

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Munculnya fenomena *bad governance* menimbulkan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan dalam tata pemerintahan. Untuk itu, pemerintah harus menata struktur pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat atau populer disebut tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, *good governance* adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa. Karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa Negara lebih dekat kepada masyarakat, penerapan *good governance* di level desa merupakan sebuah solusi canggih terhadap *bad governance* yang sudah lama diwarisi dari tradisi orde baru, yaitu sebuah pemerintahan desa yang didominasi oleh kepala desa beserta elite desa yang kurang berbasis pada partisipasi masyarakat serta transparansi, akuntabilitas dan responsivitas yang terbatas.

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Maka, hal itu berarti pembangunan tidak saja mengejar kepuasan lahiriah dan batiniyah saja akan tetapi keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial.

Oleh karena itu, demi tercapainya cita-cita tersebut maka perlu adanya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila pembangunan di Indonesia lebih diarahkan dan ditujukan pada peningkatan pembangunan desa. karena suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil atau tidak, apabila pembangunan tersebut mampu menaikkan taraf hidup masyarakat. tetapi perlu juga diukur sejauh mana pembangunan itu dapat menimbulkan kemampuan masyarakat untuk menuju perbaikan.

Lahirnya era reformasi yang di tandai dengan tumbangnya pemerintahan orde baru membawa dampak yang sangat luas dalam kehidupan bernegara di berbagai bidang pemerintahan, baik dibidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maupun dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Era reformasi membawa harapan baru bagi rakyat Indonesia khususnya dalam menghidupkan dan mengembangkan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini terwujud dengan disahkannya Undang-undang No.22/1999 tentang pemerintahan daerah. UU No.22/1999 berusaha mengembalikan demokrasi dalam arti yang sebenarnya, dimana rakyat diberi hak untuk memberikan suaranya, pendapat, saran dan pikirannya pada pemerintah lewat lembaga di desa. sehingga kebijaksanaan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk mendorong potensi daerah dibidang ekonomi, disamping itu kegiatan politik disuatu daerah menjadi semakin berkembang. Hal ini dapat menimbulkan kreativitas dan inisiatif daerah serta menciptakan masyarakat yang partisipatif, sehingga tercipta masyarakat yang mandiri tidak tergantung pada pemerintah yang ada di atasnya.

Berlakunya otonomi daerah, bangsa Indonesia telah berani memulai hal-hal yang strategis bagi bangsa dan Negara. Dalam hal ini langkah-langkah untuk demokratisasi terletak pada otonomi daerah, demokrasi yang baik selalu menekankan partisipasi aktif masyarakat baik dalam pembuatan kebijaksanaan maupun pelaksanaan, sehingga lewat kebijaksanaan yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat dan masyarakat dapat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam UU No.22/1999 disamping memuat kebijakan otonomi daerah juga terdapat kebijakan otonomi desa. Dengan demikian, secara otomatis UU No.5/1979 tentang pemerintahan desa tidak berlaku lagi. Otonomi desa membantu terciptanya demokrasi yang hakiki di tingkat pemerintahan desa. Desa bukan lagi menjadi bawahan dari kecamatan, tetapi mempunyai kewenangan sendiri dalam menjalankan pemerintahannya, yaitu sebagai berikut:

1. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintahan.

Kewenangan tersebut diberikan kepada desa, karena desa merupakan suatu organisasi pemerintahan terkecil di Negara Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasar Undang-undang No.22 th 1999 yang pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk itu didesa dibentuk pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) atau sebutan lain badan yang merupakan mitra pemerintahan desa¹. Selain itu BPD juga berfungsi mengayomi adat istiadat, pembuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila. Jumlah anggota BPD tersebut ditentukan berdasar jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial, politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Badan Perwakilan Desa dibentuk dengan maksud untuk melaksanakan fungsi legislasi ditingkat pemerintahan desa sebagai wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, sehingga masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya tentang semua permasalahan atau usulan-usulan kepada pemerintah desa dapat sampai ketujuannya. Dengan demikian masyarakat desa merasa dilibatkan dalam upaya memajukan masing-masing desa, dan merasa dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah desa, yang akhirnya anggota masyarakat yang diwakili oleh BPD bersama-sama dengan pemerintah desa dapat ikut bertanggung jawab pada pelaksanaan kebijakan pemerintah desa.

¹ Soenayo,s, *Kebijakan Dan Praktek Dalam Pengembangan Otonomi Masyarakat Desa*. Dalam www.kompas.com, diakses tgl 27-09-2004

Lebih lanjut bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa tidak lebih dari peran serta partisipasi masyarakat dan sangat ditentukan oleh orang-orang yang bekerja didalam unsur pemerintahan desa.

Selanjutnya perlu juga dipahami apa yang dimaksud dengan pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu proses memerintah dari suatu unit politik atau unit organisasi pemerintahan tertentu. Dan perlu juga dijelaskan pula bahwa pemerintah desa adalah seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat desa.²

Sedang menurut keputusan desa Pecangaan Wetan No.8/BPD/Pec. Wetan/Tahun 2001 tentang peraturan tata tertib BPD desa Pecangaan Wetan dalam ketentuan umum pasal 1 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diatur dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di tingkat kabupaten.³

Secara normatif BPD dihadirkan sebagai media pembangunan demokrasi di tingkat desa. Menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat pusat serta melakukan pengawasan atas jalannya kinerja pemerintah desa. Gagasan ideal ini, dalam realitas di lapangan tidak secara utuh masuk dan menjadi referensi individu yang ingin menjadi anggota BPD. Lembaga BPD di persepsikan beragam dan sering kali menanggalkan gagasan ideal tentang demokratisasi hubungan sosial politik desa. Bagi beberapa individu BPD lebih dimengerti sebagai kendaraan untuk mendekatkan status sosial untuk menjadi elit

² Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan*, Lingkaran Bangsa, Yogyakarta, 1999, hal 19

³ Kepdes. No.8 Th 2001 Desa Pecangaan Wetan *tentang peraturan tata tertib BPD di Desa Pecangaan Wetan, dalam ketentuan umum pasal 1*

desa. Dalam kehidupan sosial desa, status sebagai elit desa masih di anggap hal penting. Tak mengherankan kalau kemudian BPD di manipulasi sebagai wahana mobilitas vertikal di desa.

Persepsi seperti ini memberi pengaruh yang cukup signifikan atas keaktifan dan kinerja anggota BPD. Tatkala BPD di tuntutan untuk segera menjalankan fungsinya, baik dalam menata kelembagaan internal melakukan relasi kekuasaan dengan pemerintah desa, serta menjalankan fungsi-fungsi legislasi, individu-individu tersebut mengalami kegagalan. Hal ini memberi dampak pada rendahnya tingkat responsifitas atas problematika yang berkembang serta rendahnya tanggung jawab politik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan desa secara serius.⁴

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengetahui dan mencari gambaran mengenai bagaimana kinerja BPD dalam penyelenggaraan di dalam masyarakat desa, khususnya yang sedang terjadi di masyarakat Pecangaan Wetan, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Karena kinerja sebuah lembaga BPD dimasyarakat berpengaruh pada lancar atau tidaknya proses penyelenggaraan pemerintah itu barjalan. Apalagi organisasi tersebut mempunyai fungsi mewakili aspirasi rakyat yang ada di dalamnya, yang berarti juga maju atau tidaknya organisasi tersebut yang dalam hal ini BPD juga mempengaruhi maju atau tidaknya masyarakat proses penyelenggaraan pemerintahan di desa tempat BPD itu bernaung. Persepsi dari masyarakat juga akan mempengaruhi sukses atau tidaknya BPD dalam melaksanakan tugas-tugasnya dimasa yang akan datang. Bagaimanapun juga

⁴ AAGN Ari Dwipayana, *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003, hal 91

masyarakat harus memberikan persepsi yang berisi tentang pemahaman, penilaian dan pandangan terhadap BPD untuk kelangsungan perjalanan BPD itu sendiri. Dengan adanya persepsi dari masyarakat terhadap bagaimana penyelenggaraan pemerintah ditingkat desa melalui BPD, juga dapat mengetahui apakah masyarakat cukup mendukung dengan adanya BPD di dalam desa atau tidak.

Dalam hal ini keterlibatan masyarakat dalam berorganisasi sebagai akibat kesadaran kelompok nampaknya mempengaruhi partisipasi politik Dengan cara yang agak berbeda dibandingkan dengan status sosio ekonomi seperti yang telah ditunjukkan, status tersebut dapat mendorong dalam berpartisipasinya masyarakat melalui perubahan-perubahan dalam sikap terhadap kegiatan berpolitik.⁵

Adanya persepsi yang positif akan terwujud dalam bentuk melalui sikap partisipatif, perkataan, perilaku masyarakat terhadap peran anggota BPD yang positif pula, sebaliknya apabila persepsi masyarakat terhadap BPD yang negatif maka yang akan terjadi adalah sikap masa bodoh masyarakat terhadap keberadaan BPD. Baik persepsi yang bersifat positif maupun negatif akan sangat mempengaruhi BPD dalam menjalankan fungsi dan tugas BPD. Hal ini sangat penting diketahui juga oleh BPD. karena BPD berasal dari masyarakat desa dan fungsinya untuk anggota masyarakat khususnya dan untuk kemajuan desa pada umumnya. BPD juga tidak dapat terpisahkan dari masyarakat dan juga tidak dapat berdiri sendiri jauh dari masyarakat.

⁵ Samuel P. Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999

Namun apa yang terjadi dilokasi tempat penelitian yaitu di desa Pecangaan Wetan, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara bahwa persepsi adanya BPD di tengah –tengah masyarakat itu masih kurang mendapat respon dari masyarakat hal ini terbukti dari pengamatan sementara peneliti berdasar wawancara dengan Bpk Ngatijo, Spd selaku Ketua BPD di desa Pecangaan Wetan bahwa mereka/masyarakat kurang atau belum mengetahui tugas dan fungsi dari berdirinya BPD.⁶ Dan dari fakta yang ada BPD di desa Pecangaan Wetan kurang mendapat respon dari masyarakat secara penuh, hal ini dapat diketahui melalui bagaimana BPD dalam menjalankan program-program terutama pembangunan fisik di desa Pecangaan Wetan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sekitar desa. Walaupun BPD sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dari gambaran diatas, secara umum terlihat bahwa masyarakat belum dapat memfungsikan adanya BPD di desa mereka. Hal ini dikarenakan adanya budaya diam masyarakat atau pemerintah desa yang belum mamadai, atau lembaga BPD merupakan suatu lembaga baru, atau masyarakat sendiri yang belum benar-benar mengerti dan paham betul mengenai apa itu BPD. Keadaan ini dapat dilihat seperti contoh adanya pembangunan jalan yang tak kunjung selesai, karena bagaimanapun juga BPD mengharapkan adanya dukungan dari masyarakat dalam mengerjakan pembangunan di desa. dari keadaan yang terjadi tersebut dapat menandakan bagaimana partisipasi atau dukungan dari masyarakat masih rendah. Padahal BPD sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat desa sudah sepenuhnya mendukung bagaimana pembangunan tersebut dapat berjalan, tetapi

⁶ Wawancara dengan Ketua BPD Bpk Ngatijo. Spd. Pada tanggal 4 Desember 2004.

kurangnya kesadaran berpartisipasi dari masyarakat dalam mendukung program dari BPD, menjadikan program-program tersebut terhambat. Dengan demikian persepsi dari masyarakat secara umum belum dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD itu sendiri. Keadaan masyarakat seperti diatas sangatlah memprihatinkan, karena adanya BPD yang diharapkan dapat memperbaiki penyelenggaraan pemerintah didesa menjadi terhambat.

Berdasar dari masalah diatas penyusun akan meneliti lebih lanjut mengenai persepsi dari masyarakat terhadap bagaimana kinerja Badan Perwakilan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan masalahnya adalah:

Bagaimana kinerja Badan Perwakilan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di desa Pecangaan Wetan kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara tahun 2004 ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai berbagai tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisa lebih lanjut tentang kinerja yang dijalankan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) khususnya di desa tempat penelitian yaitu di desa Pecangaan Wetan.

- b. Mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat desa terhadap BPD sebagai suatu badan atau organisasi yang berdiri ditingkat desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi pembaca antara lain:

- a. Bermanfaat secara teoritis bagi pembaca dan diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan pendalaman studi ilmu pemerintahan di Indonesia. Khususnya tentang pemerintahan desa dengan BPD yang ada didalamnya.
- b. Bermanfaat secara praktis diharapkan akan memberikan gambaran mengenai permasalahan-permasalahan masyarakat desa dan upaya penyelesaiannya serta harapan-harapan masyarakat desa terhadap BPD dalam rangka membantu penyelesaian permasalahan yang ada yang didasari bagaimana persepsi masyarakat desa terhadap BPD itu sendiri.

D. KERANGKA DASAR TEORI

Sebelum membahas lebih jauh tentang variabel-variabel dalam penelitian ini dengan teori-teori yang dikemukakan, maka perlu diketahui tentang apa yang dimaksud dengan 'teori' itu:

Menurut **Sofyan Effendi** apa yang dimaksud dengan teori adalah:

"Sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis dalam fenomena social maupun alami yang hendak diteliti adalah teori, yaitu rangkaian yang logis satu preposisi atau lebih".⁷

⁷ Sofyan Effendi, *Unsur-Unsur Penelitian Ilmiah Dalam Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1984 hal 18-19.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa teori yang digunakan untuk mencari hubungan-hubungan yang sistematis dari gejala-gejala dalam fenomena sosial, agar diketahui hubungan antar variabel dari suatu yang dilakukan. Selanjutnya untuk mengadakan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh BPD dapat berjalan dengan baik atau tidak, maka secara berturut-turut akan diberikan penjelasan mengenai kinerja Badan Perwakilan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa tempat penelitian yaitu Desa Pecangaan Wetan, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sebelum meneliti dan menguraikan tentang Pemerintahan Desa, maka terlebih dahulu kami kemukakan tentang definisi mengenai penyelenggaraan.

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah "*perbuatan menyelenggarakan*". Dan pengertian menyelenggarakan adalah :

*"Melakukan atau melaksanakan (perintah), undang-undang, rancangan, rencana dan sebagainya."*⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan menurut S. Pamudji adalah ;

*"pemerintahan adalah perbuatan-perbuatan pemerintahan negara."*⁹

Bayu Suryaningrat menyebut pemerintah adalah:

"Perbuatan cara atau urusan memerintah".¹⁰

⁸ WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1981, hal 835

⁹ S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal 62

¹⁰ Bayu Suryaningrat, *Mengenai Ilmu Pemerintahan*, Aksara-aksara Baru, Jakarta, 1980, hal 10-11

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah fungsi atau perbuatan pemerintah.

Sedang pengertian Desa secara sederhana dapat dilihat sebagaimana disebutkan dalam Keputusan BPD desa Pecangaan Wetan No. 08/BPD/Pec. Wetan/Th 2001 tentang Peraturan Tata Tertib BPD Desa Pecangaan Wetan yang dimaksud dengan desa adalah:

*“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat serta budaya setempat yang diatur dalam sistem pemerintah nasional dan berada di Kabupaten”.*¹¹

Dengan demikian bahwa penyelenggaraan pemerintah desa adalah sebagai organisasi pemerintah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 pasal 94 dan pasal 95 yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah:

Pasal 94:

“Di desa dibentuk pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan pemerintahan desa”.

Pasal 95:

- (1) pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang memenuhi syarat.

¹¹ Kepdes. Pecangaan Wetan NO.08/BPD/Pec. Wetan/th2001 Tentang Tata Tertib BPD Desa Pecangaan Wetan dalam ketentuan umum pasal 1

- (3) Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disyahkan oleh Bupati".¹²

Sedangkan yang terdapat pada Undang-undang No. 32 Th 2004 yang mengatur tentang Peraturan Daerah pada Bab XI tentang Desa Pasal 200 ayat 1 yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah :

"Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa."¹³

Adapun struktur organisasi yang berada ditingkat desa meliputi:

1. Kepala Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin. Untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang antara lain: terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak putus-putus, sekurang-kurangnya berumur 25 tahun dan setinggi-tingginya berumur 60 tahun, berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu, setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik

¹² Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 94 dan 95

¹³ Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 200

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. Masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa, dan menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada Bupati.

Selain itu Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pasal 101 UU Nomor 22 tahun 1999 bab XI Desa bagian kedua adalah sebagai berikut:

“Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. membina kehidupan masyarakat desa
- c. membina perekonomian desa
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat dan
- f. mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 Kepala Desa:

- a. bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa.
- b. menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada Bupati.¹⁴

2. Perangkat Desa

a. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretaris Desa. Tugas sekretaris desa menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris desa mempunyai fungsi untuk melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

b. Kepala Urusan

Kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah menjadi calon terpilih.

Kepala urusan sedikit-dikitnya 3 (tiga) yaitu: Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum.

¹⁴ Undang-Undang No.22 Th 1999 tentang Peraturan Daerah Pasal 101, 102

Dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) yaitu: Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Urusan Keuangan.

Selanjutnya Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.

Untuk menjalankan tugas tersebut Kepala Urusan mempunyai fungsi: melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

c. Kepala Dusun

Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan Kepala Desa setelah calon terpilih.

Guna memperlancar jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam wilayah desa kemudian dibentuk dusun yang dikepalai oleh seseorang Kepala Dusun.

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. Tugasnya adalah menjalankan kegiatan Kepala Desa dan kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dusun mempunyai fungsi: melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

d. Unsur Pelaksana

Yang dimaksud unsur pelaksanaan disini adalah unsur pelaksana teknis lapangan.

2. BPD (Badan Perwakilan Desa)

Sebagai perwujudan dari demokrasi pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah desa, hal ini mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah pasal 104 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 yang mengatur tentang Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Lembaga ini dalam susunan organisasi Pemerintahan Desa adalah menjadi rekan kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Menurut Perda Nomor 8 tahun 2000 Kabupaten Jepara tentang pembentukan Badan Perwakilan Desa, yang dimaksud dengan Badan Perwakilan Desa adalah:

“Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat hasil pemilihan.”¹⁵

Sedang dalam Undang-Undang No. 32 Th 2004 Pasal 209 sebagai perbaikan Undang-Undang No 22 Th 1999 fungsi dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan ¹⁶.

¹⁵ Perda Kabupaten Jepara No 8 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa

¹⁶ Undang-undang No. 32 Th 2004 Pasal 209, 210 bag. 3 Badan Perwakilan Desa

Dengan memperhatikan pengertian BPD diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa lembaga tersebut adalah merupakan lembaga demokrasi yang berada di tingkat pedesaan, sebagai lembaga demokrasi di pemerintah desa dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang tumbuh dan berkembang di desa yang bersangkutan.

Adapun mengenai jumlah anggota BPD adalah tidak selalu sama dalam setiap desa yang bersangkutan. Ketentuan mengenai jumlah anggota BPD adalah sebagai berikut:

1. jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, sebanyak 5 orang.
2. jumlah penduduk 1501-2000 jiwa, sebanyak 7 orang.
3. jumlah penduduk 2001-2500 jiwa, sebanyak 9 orang.
4. jumlah penduduk 2501-3000 jiwa, sebanyak 11 orang.
5. jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, sebanyak 13 orang. Tidak termasuk sekretaris.¹⁷

Adapun kedudukan, tugas, dan fungsi dari BPD adalah:

- (1). BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa. Selain itu BPD juga merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2). BPD mempunyai tugas dan wewenang sbb:
 - a. Bersama-sama pemerintah Desa membentuk panitia pemilihan Petinggi.

¹⁷ Perda Kab. Jepara No.8 Th 2000 tentang Badan Perwakilan Desa pasal 7 tentang keanggotaan, kepengurusan dan masa bakti..

- b. Menetapkan dan mengusulkan pengesahan pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Petinggi.
- c. Memberikan persetujuan kepada petinggi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.
- d. Pimpinan BPD memberikan persetujuan kepada petinggi dalam pengangkatan dan pemberhentian sekretariat dan Staf Sekretariat Desa.
- e. Bersama-sama dengan Petinggi merumuskan dan menetapkan APBDesa.
- f. Bersama-sama dengan Petinggi merumuskan menetapkan peraturan Desa.
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - Praturan Desa dan Keputusan Petinggi
 - Pelaksanaan APBDesa
 - Kebijakan Pemerintah Desa
 - Pelaksanaan kerjasama antar Desa atau pihak lain
- h. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Desa terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa.
- i. Mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati karena:
 - meninggal dunia
 - habis masa jabatannya .
 - permintaan sendiri secara tertulis
 - pertanggung jawaban Kepala Desa 2 kali ditolak BPD.
 - tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar sumpah/janji.

- melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

(3). Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 BPD mempunyai fungsi:

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintahan Desa.
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- d. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

(4). Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 4 keputusan ini, BPD mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengadakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa
- c. Bersama-sama Pemerintahan Desa menetapkan Anggaran Belanja BPD
- d. Menetapkan peraturan Tata Tertib BPD

- e. Mengajukan pendapat, minta informasi pada pemerintah desa dan masyarakat
- f. Meminta pertanggung jawaban Petinggi
- g. Anggota dan pimpinan BPD menerima uang sidang dan atau tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(5). Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 keputusan ini, BPD mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mengamalkan Rancangan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Melaksanakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat didesanya berdasarkan demokrasi ekonomi.
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta ikut menindaklanjuti penyelesaiannya.¹⁸

Untuk itu BPD mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan desa, karena apa yang diajukan dalam musyawarah desa adalah benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut.

Pada dasarnya keberhasilan pembangunan desa adalah tujuan untuk mencapai pembangunan nasional. Sehingga apabila pembangunan desa merupakan target yang akan dicapai, maka pembangunan desa tersebut sangat menunjang bagi keberhasilan pembangunan nasional.

¹⁸ Kepdes No: 8/BPD/Pec. Wetan/Th 2001 tentang peraturan tata tertib BPD Desa Pecangan-Wetan, pasal 2, 4, 6, 7 mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewajiban

3. Kinerja Organisasi

Dalam bahasa Inggris pada kata untuk istilah kinerja yaitu “*performance*” menurut Thescribner Batam Dictionary, 1979, kinerja berasal dari kata “*to performance*” yang mempunyai beberapa istilah “*entries*” sebagai berikut:¹⁹

- a. Melakukan, menjalankan, melaksanakan
- b. Memenuhi atau menjalankan kewajiban dalam suatu permainan
- c. Menggambarkan dengan sarana atau alat musik
- d. Melaksanakan dengan sarana alat musik
- e. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab
- f. Melakukan usaha kegiatan dalam suatu permainan
- g. Memainkan (pertunjukan musik)
- h. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin

Dalam kaitannya dengan kinerja, maka “*entries*” yang paling tepat adalah: a, b, c, sampai h, yakni melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan menurut **Suyudi Prawira Sentana** yaitu:

*“Performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”*²⁰

Jadi pengertian kinerja adalah hasil yang telah dicapai oleh seseorang untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam suatu organisasi

¹⁹Suyudi Prawira Sentana, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, BPFE, Yogyakarta, 1999 hal 2

²⁰ *Ibid*, hal 2

terdapat suatu tim yang diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. King (dalam Goetsen dan davis) menganjurkan strategi yang disebut sepuluh perintah tim (*ten team command ments*) untuk meningkatkan kinerja setiap tim dalam rangka pencapaian tujuan organisasi antara lain:

1. Saling ketergantungan

Saling ketergantungan diperlukan diantara para anggota tim dalam hal informasi, sumber daya pelaksanaan tugas dan dukungan, adanya saling ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim.

2. Perluasan tugas

Setiap tim harus diberi tantangan karena reaksi atau tanggap tersebut akan membentuk semangat persatuan (*esprit de corps*) kebanggaan dan kesatuan tim.

3. Pengajaran (*aligment*)

Anggota tim harus mampu menyingkirkan setiap individualisme dalam rangka mencapai misi tertentu.

4. Bahasa yang umum

Pimpinan tim harus mengusahakan penggunaan bahasa umum, karena biasanya anggota tim berasal dari departemen yang berbeda (pemasaran, produksi, personalia, keuangan, riset, dan pengembangan dan sebagainya) yang memiliki perbendaharaan kata (istilah teknis/angan sendiri).

5. Kepercayaan/respek

Dibutuhkan waktu dan usaha untuk membentuk kepercayaan dan respek agar setiap anggota tim dapat bekerjasama.

6. Kepemimpinan/keanakbuahan yang dibagi rata

Setiap individu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda, oleh karena itu pemimpin yang baik harus dapat memerhatikan bakat tertentu setiap anggota tim, sehingga kepemimpinan dan keanakbuahan dapat dibagi bersama.

7. Ketrampilan pemecahan masalah

Tim harus banyak menggunakan waktu untuk membina kemampuan anggota dalam memecahkan masalah karena masalah merupakan hal yang selalu dihadapi setiap organisasi.

8. Ketrampilan menangani konfrontasi/konflik

Dalam lingkungan kerja yang *high pressure* dan kompetitif, konflik merupakan hal yang tak terelakkan, perbedaan pendapat (ide, masalah dan pemecahan masalah) dan penyampaian ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain yang bersangkutan.

9. Penilaian tindakan

Penilaian dilakukan dengan memantau dan membandingkan apa yang telah dilakukan dengan pernyataan misi dan rencana tindakan yang ada, rencana tindakan berisi tujuan, sasaran jangka waktu dan penugasan serta tanggung jawab setiap anggota.

10. Perayaan

Kesuksesan yang ingin dicapai suatu sistem yang efektif dapat diperkuat dengan jalan merayakannya. Penghargaan dan pengakuan atas tugas yang

terlaksana dengan baik akan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih giat dan tangkas dalam mencapai tujuan berikutnya.

Dengan demikian, maka kunci pokok keberhasilan kerja sama tim terletak pada harmonisasi dan kolaborasi antara individu tim dan organisasi alam mewujudkan tujuan dan harapan yang sama. Adapun semua pihak dituntut untuk dapat menjalin hubungan yang sinergis dan mutualis yang semuanya dapat digambarkan melalui kepanjangan dari kata team yaitu "*together every one achieves more*"

Jadi pengertian kinerja adalah usaha yang dicapai oleh seseorang yang diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. Kinerja dan prestasi yang diraih oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:²¹

1. Aspek Produktivitas (*Productivity*)

Perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output) apabila keluaran atau hasilnya lebih besar dari pada masukan atau ongkosnya maka kondisi ini disebut efisien.

2. Aspek Kualitas (*quality of service*)

Merupakan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi menyangkut aspek *Quality of service*

²¹ Ulung pribadi, *Diktat kuliah Pengembangan Organisasi Publik*, UMY, 2001

3. **Responsivitas (*responsiveness*)**

Merupakan kebutuhan sistem itu sendiri, sedangkan dari suatu kerjasama dalam suatu sistem (antar individu) adalah hasil gabungan efisiensi dan upaya yang dipilih masing-masing individu.

Sehingga efektivitas dari kelompok (organisasi perusahaan) adalah tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya dapat mencapai tujuan . bila pengorbanannya terlalu besar maka dapat dikatakan tidak efisien.

4. **Responsibilitas**

Dalam organisasi yang baik, wewenang dan tanggung jawab telah dilakukan dengan baik pula, antara wewenang dan tanggung jawab jangan sampai tumpang tindih, tugas masing-masing mengetahui apa yang menjadi haknya dan tanggung jawab dalam rangka organisasi mencapai tujuan kejelasan wewenang kinerja organisasi tersebut.

5. **Disiplin (*discipline*)**

Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan karyawan. Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang berlaku kepada atasan dimana disiplin tersebut akan memberikan corak terhadap kinerja organisasi.

Aspek disiplin merupakan bagian yang penting dalam kinerja suatu organisasi supaya organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan organisasi yang ingin dicapai

Adapun dalam menjalankan agenda kerjanya BPD beserta aparatur pemerintahan desa perlu adanya penyertaan masyarakat desa dimana BPD itu berdiri. Maka dari itu persepsi masyarakat menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat pemerintahan desa tidak bisa berjalan tanpa adanya partisipasi masyarakat.

Adanya persepsi masyarakat yang mengarah pada bagaimana kinerja BPD itu berjalan maka perlu diketahui tentang pengertian dari persepsi masyarakat.

Persepsi masyarakat tentang mekanisme pelaksanaan pemerintahan desa akan berpengaruh positif terhadap penentuan sikap masyarakat dalam berpartisipasi.

Adapun karakteristik dari orang-orang yang dilihat atau dinilai dalam proses persepsi sosial adalah:

Status orang yang akan dinilai akan mempunyai pengaruh yang besar bagi persepsi orang yang menilai, orang yang dinilai ditempatkan dalam kategori tertentu untuk memudahkan pandangan-pandangan orang yang menilai dan biasanya kategori tersebut terdiri dari status dan peranan, sifat perangai orang-orang yang dinilai akan memberikan pengaruh yang besar terhadap persepsi orang lain terhadap dirinya atau suatu badan tertentu.

Menurut **Miftah Thoha** tentang persepsi :

“Persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh tiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.”²²

²² Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, CV Rajawali, 1984 hal.30.

Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa dalam memahami sesuatu obyek yang terdapat didalam lingkungan, setiap individu mempunyai persepsi yang berbeda-beda.

Lewat perangkat indera seseorang itulah yang kemudian diolah oleh pikiran yang akan melahirkan persepsi tentang sesuatu.

Selanjutnya **Hogam dan Hareman** mengatakan bahwa:

“Persepsi adalah sebagai proses melalui kesadaran kita terhadap lingkungan, yaitu dengan seleksi, menyusun kedalam pikiran dan interpretasi fakta-fakta indera kita.”²³

Dalam kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah desa maka masyarakat akan memberikan tanggapan terhadap mekanisme kerja apabila mereka melihat dan merasakan proses kerja dari pemerintah tersebut.

Persepsi tersebut turut mempengaruhi sikap mereka yaitu masyarakat untuk beradaptasi. Fakta-fakta yang ada seperti pembangunan fisik desa yang memerlukan suatu perencanaan yang matang tersebut berpengaruh terhadap masyarakat dalam memberikan tanggapan mengenai mekanisme pemerintahan desa.

Kondisi riil antara desa yang satu dengan desa yang lain keadaannya tidaklah sama sehingga dalam pelaksanaan pembangunan bisa saja terjadi disuatu desa pembangunannya sudah maju karena berbagai faktor yang mendukung, dipihak lain masih jauh ketinggalan karena keterbatasan faktor pendukung pembangunan.

²³ Mar'at, *Skap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*, PT. Ghalia, Bandung, 1985, hal 25.

Dalam mengatasi ketertinggalan tersebut, pemerintah melaksanakan kebijakan yang bisa merangsang pembangunan dengan memulai pada penataan administrasi pemerintahan desa, dimana desa sebagai sumber berbagai bahan keterangan dan sumber data yang paling murni dan mendekati kenyataan. Data dan bahan yang diperoleh dari desa seringkali dipergunakan untuk rencana daerah atau pemerintah.

Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi pemerintahan desa merupakan mata rantai yang paling bawah dalam keseluruhan hubungan jalannya pemerintahan di Indonesia. Sehingga tata tertib dan terbinanya pemerintahan desa akan sangat berpengaruh dalam tata kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa mekanisme pelaksanaan pemerintah dapat melakukan berbagai hal dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan. Untuk itu keikutsertaan atau partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam mencapai keberhasilan pembangunan dan pemerintahan desa.

Dengan demikian masyarakat akan ikut serta dalam pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan karena mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pembangunan yang sedang atau yang sudah dilaksanakan.

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diatur dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.

- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan oleh pemerintah terendah yakni Pemerintah Desa.
- c. Persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh tiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.
- d. Kinerja adalah hal yang telah dicapai oleh seseorang untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan didalam suatu organisasi ini terdapat suatu tim yang telah diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai misi dan tujuan organisasi.
- e. BPD (Badan Perwakilan Desa) adalah badan perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat desa dan organisasi sosial politik yang ada di desa.
- f. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah cara yang di lakukan oleh jajaran aparatur pemerintahan di tingkat desa.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Menurut Koentjaraningrat, yang di maksud dengan definisi operasional adalah:

“usaha mengubah konsep-konsep yang berupa construct dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.”²⁴

Karakteristik dari orang-orang yang dilihat atau dinilai dalam proses persepsi sosial adalah :

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta 1974, hal 75

Status orang yang dinilai akan mempunyai pengaruh yang besar bagi persepsi orang yang menilai, orang yang dinilai ditempatkan dalam kategori tertentu untuk memudahkan pandangan-pandangan orang yang menilai dan biasanya kategori tersebut terdiri dari status dan peranan, sifat perangai orang-orang yang dinilai akan memberikan pengaruh yang besar terhadap persepsi orang lain terhadap dirinya atau suatu badan tertentu.

Adapun kinerja Badan Perwakilan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat di ukur dari:

- a. Aspek produktivitas yaitu perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output). Indikator yang mempengaruhi produktivitas dari tugas BPD di desa Pecangaan Wetan yaitu, diantaranya mengenai berapa jumlah Peraturan Desa yang telah dikeluarkan oleh BPD yang bekerja sama dengan Kepala Desa serta bagaimana BPD dalam melakukan pengawasan terhadap peeraturan desa.
- b. Aspek responsivitas yaitu kemampuan organisasi BPD untuk menggali kebutuhan masyarakat. Dan indikator-indikator yang mempengaruhi responsivitas BPD melliputi misalnya dalam pembuatan Peraturan Desa, BPD menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terkait masalah ekonomi, sosial atau politik dan budaya yang terjadi di desa Pecangaan Wetan.
- c. Aspek kualitas yaitu merupakan efektifitas pelayanan yang diberikan organisasi. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kualitas BPD

diantaranya adalah bagaimana BPD sebagai penyalur aspirasi rakyat di desa dalam menanggapi tuntutan atau aspirasi rakyat desa.

- d. Aspek tanggungjawab yaitu sejauh mana kegiatan organisasi disini BPD sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut/prinsip-prinsip kebijakan organisasi. Disini BPD sudah sesuai atau belum dengan norma-norma budaya di desa Pecangaan Wetan, yaitu norma dan budaya yang dianut dan dilihat dari segi kultur. Adapun indikator-indikatornya meliputi bagaimana BPD dalam melestarikan adat istiadat didesa, selain itu bagaimana BPD dalam berperan dalam bidang sosial dan budaya di masyarakat.
- e. Aspek disiplin yaitu disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat dan disetujui serta berkaitan erat dengan sanksi yang berlaku dimana disiplin tersebut akan memberikan corak terhadap kinerja BPD dalam mengacu peningkatan disiplin anggota BPD dapat dilihat dari ketepatan waktu. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi aspek disiplin BPD adalah bagaimana anggota BPD dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya sebagai organisasi sebuah lembaga yang berdiri dilingkungan masyarakat dalam menerapkan kedisiplinan terhadap anggotanya.

G. METODE PENELITIAN

Menurut Winarno Surachmad bahwa:

“Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan mempergunakan teknik data dan alat-alat tertentu. Cara utama itu diperoleh setelah penyidik memperhitungkan atau ditinjau dari tujuan penyidik serta dari suatu penyidik.”²⁵

Dalam suatu penelitian selain menggunakan metode agar berjalan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan, juga harus menggunakan type atau jenis penelitian.

Dalam penelitian ini jenis atau type penelitian yang digunakan adalah jenis atau type penelitian deskriptif dan menggunakan metode kualitatif.

Sedangkan menurut Muhammad Nasir bahwa:

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas penelitian pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan-hubungan antar fenomena yang diselidiki.”²⁶

1. Unit Analisis

Unit analisis yang diharapkan dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pecangaan Wetan, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara yang merupakan perwakilan-perwakilan kepala keluarga di tiap RW dan aparat pemerintah desa serta anggota Badan Perwakilan Desa berfungsi sebagai penegas dari persepsi masyarakat.

²⁵ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito Bandung, 1978, hal 131

²⁶ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 63

2. Data Yang Dibutuhkan

Data disini adalah segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Sumber data yang langsung (primer)

Yaitu data yang diperoleh dari responden melalui hasil wawancara terhadap pihak-pihak terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala desa, Ketua BPD dan dari masyarakat desa Pecangaan Wetan.

b. Sumber data tidak langsung (sekunder)

yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku, laporan, dokumentasi dan dari catatan-catatan yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah contoh atau wakil dari suatu preposisi yang begitu besar jumlahnya.

Pengambilan sampel bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai obyeknya, dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi. Jadi dalam penelitian ini tidak perlu meneliti semua dalam individu yang ada dalam populasi, tetapi dapat dilakukan dengan mengambil sebagian dari populasi yang disebut sample.

Rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah rumus yang dikembangkan oleh Frank Lynch dengan formulasi sebagai berikut:

Keterangan:

$$n = \frac{N \cdot z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{N \cdot d^2 + z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}$$

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi (yaitu jumlah warga masyarakat Desa Pecangaan Wetan yang sudah berhak memilih anggota BPD sebanyak 2448 jiwa).

Z = nilai dari variabel normal (1,96) untuk tingkat kepercayaan 95%

d = sampling error (0,10)

p = harga patokan tertinggi (0,5)

jadi penghitungan dalam menentukan jumlah sampel adalah:

$$\begin{aligned} n &= \frac{2448(1,96)^2 \cdot 0,50(1 - 0,50)}{2448(0,10)^2 + (1,96)^2 \cdot 0,50(1 - 0,50)} \\ &= \frac{2448 \cdot 3,84 \cdot 0,25}{24,48 + 0,96} \\ &= \frac{2350,08}{25,44} \\ &= 923 \end{aligned}$$

di bulatkan menjadi 92 orang.

Dan sebagai sampelnya adalah beberapa warga masyarakat di Desa Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang terdiri dari 92 orang, sebagai wakil dari jumlah warga yang sudah memenuhi syarat untuk memilih anggota BPD yaitu sebanyak 2448 jiwa guna mengetahui berapa besar partisipasi masyarakat desa terhadap kinerja BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Teknik yang digunakan penyusun dalam mengambil sampel dalam penelitian ini adalah teknik random sampling yaitu sampel yang diambil secara acak sehingga unit analisa dari populasi punya kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Jadi untuk menentukan sampel dari suatu populasi tidaklah harus mengamati seluruh populasi yang ada. Melainkan penyusun membatasi pada beberapa masyarakat yang ada di Desa Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara .

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Melalui observasi penyusun langsung terjun ke lapangan/lokasi penelitian untuk mengetahui sifat dan keadaan masyarakat, letak dan keadaan geografis desa, serta fenomena-fenomena sosial yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Cara ini penyusun menilai sangat penting untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan responden.

Selanjutnya untuk mendapatkan data yang valid (absah), penyusun berupaya membandingkan data yang diperoleh dari pengumpulan data di atas, karena seperti diungkapkan oleh **Jalaludin Rakhmat** bahwa :

*"ancaman validitas sering terjadi penelitian yang menggunakan questioner atau wawancara jawaban responden sering tidak jujur."*²⁷

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data yang diperoleh penyusun menggunakan teknik triangulasi. Menurut **Lexy j. Maleong** bahwa :

*"triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu."*²⁸

Lebih lanjut dijelaskan bahwa teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

²⁷ Jalaludin Rakhmat, *Metode Komunikasi*, Remaja Karya, Bandung, 1990, hal. 84

²⁸ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Kaya, Bandung, 1990, hal.171

5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²⁹

Selanjutnya dalam kaitan dengan penelitian ini maka untuk memeriksa keabsahan data, penyusun membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan serta membandingkan suatu dokumen dengan data observasi.

Dengan langkah-langkah tersebut penyusun berupaya untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- b. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan obyek penelitian berupa buku-buku, surat-surat, catatan dokumen atau laporan-laporan, peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan-kebijaksanaan tertulis yang terdapat di lokasi penelitian.

Dokumen menurut, **Winarno Surachmat** adalah:

“Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pencatatan-pencatatan atau pengambilan gambar-gambar dari dokumentasi yang terdapat ditempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti.”³⁰

- e. Teknik Interview/wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan wawancara yang lebih mendalam antara peneliti dengan responden secara tatap muka (berhadapan Langsung) dengan menanggapi dan mencatat keterangan-keterangan yang dikumpulkan responden.

²⁹ *Ibid*, hal 178, 180

³⁰ Winarno Surachmat, Op cit, Hal 135.

d. Questioner (daftar pertanyaan)

Yaitu suatu daftar yang berisikan pertanyaan sesuatu hal atau dalam suatu bidang. Kuisisioner merupakan suatu metode penyelidikan dengan menggunakan daftar-daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh seorang yang dijadikan sasaran dari penyelidikan tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Dalam uraian diatas, telah dijelaskan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif yang oleh Ratnawati bahwa:

“Bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu perubahan.”³¹

Selanjutnya dalam rangka menganalisis data penyusun mencoba menyusun, mengkategorikan serta menginterpretasikan data yang ada di lapangan/lokasi dan mencoba untuk memahami kemudian menarik suatu kesimpulan sebagaimana pendapat S. Nasution:

“Analisis data dalam penelitian yang bersifat deskriptif bukanlah tahap tertentu yang diberikan bab tertentu seperti halnya dengan penelitian kuantitatif, analisis dalam penelitian deskriptif telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.”³²

Menurut Hammerste dan Atkinson bahwa :

“Proses analisis dalam penelitian deskriptif melalui langkah-langkah sebagai berikut:

³¹ Ratnawati, *Analisis Varians untuk Masalah Politik dan Pemerintahan*, Yogyakarta, Liberty, 1990, hal 10

³²S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif*, Tarsito Bandung, 1992, hal.138

- a. Membahas dan mempelajari data yang terkumpul sampai dikuasai sepenuhnya sambil memikirkannya untuk mencari apakah pola-pola yang menarik.
- b. Melihat berbagai konsep yang timbul yang digunakan responden
- c. Merangkum sejumlah data dan mencoba menangkap karakteristik kategori data tertentu.
- d. Mencari hubungan antara konsep-konsep dalam usaha untuk mengembangkan suatu teori.³³

Adapun teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata, atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan. Selanjutnya menganalisa dengan gejala atau obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atas dasar teori yang ada serta runtut memakai makna yang bersifat menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari Perda, hasil wawancara, catatan, laporan, dokumentasi pribadi, artikel media masa dan sebagainya.

Berpedoman pada uraian diatas, maka teknik analisa data dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengumpulan data
2. Penilaian data

³³ Ibid, hal 139

3. Penafsiran data

4. Penyimpulan data dan generalisasi

Pertama, seperti telah diuraikan didepan data yang dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi atau penelitian kepustakaan dan observasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer, sekunder ataupun dokumentasi. Pengumpulan data tersebut disertai pula dengan pemilihan, cheking, dan reduksi data yang relevan dengan masalah dan pokok-pokok dalam wawancara dan dokumentasi.

Kedua, problematika dalam penelitian kualitatif pada umumnya menyangkut masalah validitas maupun obyektifitas. Teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata, atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan. Selanjutnya menganalisa dengan gejala atau obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atas dasar teori yang ada serta runtut memakai makna yang bersifat menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari Perda-Perda, hasil wawancara, catatan, laporan, dokumentasi pribadi, artikel media massa, dan sebagainya. Untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini, diujikan dengan memperhatikan validitas (kesahihan).

Untuk memenuhi dua kriteria tersebut dapat ditempuh melalui beberapa prosedur yaitu:

- i. Mengkategorikan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan sistem pencatatan yang relevan.
- ii. Melakukan kritik atas data sekunder yang telah tersedia. Kritik ini ditujukan untuk melalui kontrol apakah data tersebut sangat relevan dilakukan.

Karena studi ini menggunakan jenis data sekunder, maka untuk tahap penilaian data dilakukan dengan cara pemahaman dan kemudian dilakukan kontrol atas data yang tersedia. Dengan cara kontrol seperti itu, maka diharapkan akan dapat diperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu cara ini ditujukan juga untuk memenuhi kriteria validitas maupun obyektifitas.

Ketiga, langkah penafsiran data pada prinsipnya tidak berbeda dengan langkah penilaian data. Akan tetapi satu tingkat di atasnya, langkah ketiga ini membutuhkan kecermatan yang harus dibekali seperangkat kerangka konseptual yang telah disusun di awal. Interpretasi disini berarti memberikan makna kepada data, menjelaskan pola dan hubungan antara berbagai konsep. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa penafsiran data ini lebih menggambarkan perspektif atau pandangan dari penyusun, bukan pada kebenaran mutlak.

Keempat, setelah tahap penilaian dan penafsiran data dengan seperangkat konsep-konsep yang dimaksud selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan atau generalisasi.

Teknik Penentuan Skor

Setiap jawaban dari responden atas daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis akan diberi skor tertentu, yaitu:

- Nilai 1 untuk nilai buruk
- Nilai 2 untuk nilai kurang
- Nilai 3 untuk nilai cukup
- Nilai 4 untuk baik
- Nilai 5 untuk nilai sangat baik

Kemudian untuk menentukan kelas interval/kategori rata-rata, dapat dicari rumus sebagai berikut:

$$\frac{5-1}{1} \cong 0,8$$

Indeks

Untuk mencari indeks digunakan rumus sebagai berikut:

$$I \cong \frac{5x F_1 + 4x F_2 + 3x F_3 + 2x F_4 + 1x F_5}{N}$$

Keterangan:

I = Indeks dari sampel/sub sampel

F = Frekuensi sampel/sub sampel/pertanyaan

N = Jumlah sampel

H. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Tulisan ini secara keseluruhan disusun berdasarkan per bab yang selanjutnya akan dibagi ke dalam sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan jenis masalah dalam pembagian bab-babnya. Sedangkan dalam subnya dimaksudkan untuk menguraikan isi dari tiap-tiap bab secara terperinci, sehingga diharapkan akan memperoleh suatu permasalahan secara menyeluruh.

Sistematika penulisan skripsi ini antara lain mencakup:

- BAB I.** Memuat pendahuluan dari tulisan ini yang didalamnya mencakup, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional dan metode penelitian.
- BAB II.** Memuat tentang gambaran umum/deskripsi wilayah penelitian yaitu desa Pecangaan Wetan kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara diantaranya data primer dan data sekunder. Data sekunder meliputi keadaan geografi, keadaan demografi, keadaan sosial ekonomi. dan dari data primer meliputi data yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, data dari masyarakat yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa terutama peran BPD serta data dari anggota BPD yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Serta memuat tentang profil pemerintahan desa Pecangaan Wetan dan profil BPD di desa Pecangaan Wetan.

BAB III. Memuat tentang bagaimana kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tempat penelitian yaitu desa Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Serta memuat deskripsi sampel yang meliputi deskripsi dari responden, anggota BPD, aparatur pemerintah desa Pecangaan Wetan, serta masyarakat desa.

BAB IV Penutup dari keseluruhan pembahasan yang merupakan kesimpulan akhir.